

AUTONOMY

KK
Fw AM 12/01
Hid
0

B

OTONOMI DAERAH DAN KESIAPANNYA

(Studi Deskriptif Upaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam Meningkatkan PAD guna menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan UU. No. 22/1999, selama tahun 1998-2000)

SKRIPSI



Disusun Oleh

NIKMATUL HIDAYATI

NIM.079514982

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 2000/2001**

OTONOMI DAERAH DAN KESIAPANNYA

(Studi Deskriptif Upaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam Meningkatkan PAD guna menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan UU. No. 22/1999, selama tahun 1998-2000)

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Airlangga

Surabaya



Disusun Oleh

NIKMATUL HIDAYATI

NIM.079514982

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 2000/2001**

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **OTONOMI DAERAH DAN KESIAPANNYA**
(Studi Deskriptif Upaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam meningkatkan PAD Guna Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah berdasarkan UU. No. 22/1999 selama tahun 1998-2000)

Telah Diujikan pada : Jam 09.00 WIB, Rabu, 20 Desember 2000

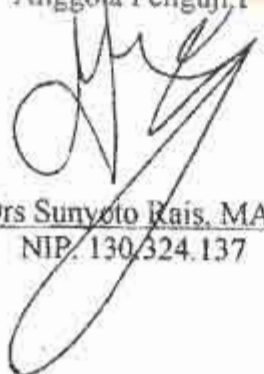
Tempat Ujian : Ruang Sidang 220
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA




Ketua Penguji


Drs. Boestoto HP, SU
NIP. 130.783.545

Anggota Penguji I


Drs Sunyoto Rais, MA
NIP. 130.324.137

Anggota Penguji II


Drs Faliq Suaedi, Msi
NIP.131.801.403

ABSTRAKSI

Kehidupan Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah di Indonesia kembali diwarnai dengan suatu fenomena baru yaitu dengan ditetapkannya UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menggantikan UU. No. 5/1974. UU. No. 5/1974 cenderung sentralistik dan kurang menampung aspirasi dari bawah. Fokus Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi, yang mewajibkan Daerah melakukan segala tindakan yang paling tepat bagi Daerahnya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini mencanangkan adanya otonomi daerah baru. Pada prinsipnya terdapat tiga bidang kerja yang secara desentralisasi diserahkan kepada Daerah, yaitu keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan. Dalam klausa keuangan diharapkan Daerah dapat membiayai segenap pengeluarannya, yang sementara ini masih membebani anggaran pusat dari sektor sumbangan, subsidi dan bantuan untuk Daerah.

Dalam bidang keuangan, UU. No. 22/1999 secara langsung membentuk Daerah agar lebih mandiri dalam penyediaan dana bagi pengeluarannya. Oleh karena itu Daerah harus membebani Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, karena dari sektor PAD-lah Daerah dapat mengupayakan segala pemasukan untuk menutupi segenap Anggaran Belanja Daerah-nya. Sebuah fenomena yang menarik ketika Daerah harus berlomba-lomba meningkatkan PAD-nya. Sementara ini dari data yang ada secara rata-rata PAD di masing-masing Daerah di Indonesia hanya mensuplai sebanyak 25% dari total penerimaannya, sedangkan sisanya masih tergantung kucuran dana dari Pusat. Suatu kasus ketergantungan yang parah.

Karena hal ini pula Kota Surabaya sebagai salah satu Daerah yang wajib dalam hal kemandirian penyediaan dana, memiliki permasalahan yang besar. Data menunjukkan bahwa PAD Kota Surabaya hanya menyumbang sebesar 30% dari total penerimaan pada tahun anggaran 1998/1999 s/d 1999/2000. Artinya Pemerintah Kota Surabaya harus segera mengupayakan peningkatan pemasukan di sektor PAD sebagai langkah untuk keluar dari ketergantungan sebagaimana dicanangkan UU. No. 22/1999.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD. Upaya tersebut meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam upaya intensifikasi, Pemkot Surabaya menempuh peningkatan SDM, meningkatkan mutu pelayanan dan perbaikan sistem prosedur administrasi pemungutan yang tergolong PAD. Sedangkan upaya ekstensifikasi yang dilakukan meliputi usulan kepada DPRD Kota Surabaya, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka meminta bagian atas pajak ataupun pungutan yang dikelola mereka serta mengefektifkan kembali beberapa Pajak dan Retribusi yang telah dihapus berdasarkan Undang-Undang No. 18/1997.